

Implementasi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Hambatan Sosial Ekonomi Kultural di Kawasan Pesisir Kelurahan Bulu

Tri Susilowati *, Mamik Indaryani, Joko Utomo

Universitas Muria Kudus.

icushuga@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of handling Out-of-School Children (ATS) through the Yuk Sekolah Maneh (YSM) Movement and identify the social, economic, and cultural barriers affecting it in the coastal area of Bulu Village, Jepara. The background of this research is the increasing number of ATS from 20 people (2023) to 31 people (2025). The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman and Fishbone diagrams. The results show that the implementation of the YSM program is not optimal due to complex and interrelated barriers. Economic barriers in the form of structural poverty force children to work. Social barriers are reflected in weak parental supervision and peer influence. Cultural barriers are seen in the pragmatic views of coastal communities who consider work more important than school. From the government side, budget limitations and weak inter-agency coordination are the main obstacles. This study recommends improvement policy strategies including strengthening integrated data collection, differentiation of educational services, family economic empowerment, and strengthening multi-stakeholder coordination.

Keywords: *Children Not in School, socio-economic and cultural barriers, coastal communities, policy implementation, Fishbone diagram.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Gerakan Yuk Sekolah Maneh (YSM) serta mengidentifikasi hambatan sosial, ekonomi, dan kultural di kawasan pesisir Kelurahan Bulu, Jepara. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya angka ATS dari 20 orang (2023) menjadi 31 orang (2025). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta diagram *Fishbone*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program YSM belum optimal karena menghadapi hambatan kompleks yang saling terkait. Hambatan ekonomi berupa kemiskinan struktural memaksa anak bekerja. Hambatan sosial tercermin dari lemahnya pengawasan orang tua dan pengaruh teman sebaya. Hambatan kultural terlihat dari pandangan pragmatis masyarakat pesisir yang menganggap bekerja lebih penting daripada sekolah. Dari sisi pemerintah, keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan strategi kebijakan perbaikan yang meliputi penguatan

pendataan terpadu, diferensiasi layanan pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan koordinasi multi-stakeholder.

Kata Kunci: Anak Tidak Sekolah, hambatan sosial ekonomi kultural, masyarakat pesisir, implementasi kebijakan, diagram Fishbone.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan wajib dasar minimal selama 12 tahun. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di lapangan tidak selalu berjalan mulus, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks seperti kawasan pesisir.

Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, termasuk di Kabupaten Jepara. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara (2025), Kelurahan Bulu yang merupakan kawasan pesisir mengalami peningkatan jumlah ATS yang signifikan dari 20 orang pada tahun 2023 menjadi 31 orang pada tahun 2025. Peningkatan ini terjadi meskipun Pemerintah Kabupaten Jepara telah meluncurkan program Gerakan *Yuk Sekolah Maneh* (YSM) berdasarkan Instruksi Bupati Jepara Nomor 050/I Tahun 2023 sebagai strategi percepatan penuntasan ATS dan pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun.

Fenomena ATS di Kelurahan Bulu tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai masalah akses terhadap pendidikan semata. Wilayah ini secara geografis dekat dengan pusat kota dan memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan struktural, kultural, dan sosial-ekonomi yang lebih kompleks. Sebagai wilayah pesisir, mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor informal seperti nelayan, buruh pelabuhan, dan pedagang kecil dengan penghasilan yang tidak stabil. Kondisi ini seringkali mendorong keluarga untuk melibatkan anak dalam pekerjaan produktif guna menambah pendapatan keluarga.

Dari aspek kultural, masyarakat pesisir Kelurahan Bulu masih terikat pada nilai-nilai tradisional yang memandang pendidikan sebagai sesuatu yang tidak memberikan keuntungan langsung. Budaya kerja sejak usia muda dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan diwajibkan, karena anak dipandang sebagai aset tenaga kerja keluarga (Koentjaraningrat, 2009). Nilai budaya ini mengakar kuat dan menyebabkan rendahnya investasi keluarga terhadap pendidikan anak. Selain itu, praktik perkawinan dini masih dapat ditemukan, terutama pada anak perempuan, yang menyebabkan mereka berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor penyebab anak tidak sekolah, namun belum secara komprehensif mengkaji dinamika implementasi program penanganan ATS yang berbasis kelurahan dalam konteks masyarakat pesisir perkotaan. Asmiati dkk. (2022) meneliti rendahnya minat belajar di kalangan masyarakat nelayan di Lombok Timur, namun belum menyoroti aspek manajemen kebijakan pemerintah di tingkat lokal. Senowarsito dkk. (2023) menelaah faktor penyebab anak putus sekolah di Jepara secara umum, namun belum menggali secara mendalam implementasi penanganan ATS di tingkat kelurahan. Penelitian mengenai implementasi penanganan ATS yang memadukan aspek manajemen program dengan faktor sosial, ekonomi, dan kultural dalam konteks masyarakat pesisir masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi program penanganan Anak Tidak Sekolah melalui Gerakan *Yuk Sekolah Maneh* (YSM) di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penanganan ATS melalui pendekatan analisis *Fishbone*; (3) menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan kultural terhadap implementasi program; serta (4) merumuskan rekomendasi strategis kebijakan perbaikan pelaksanaan penanganan anak tidak sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yakni implementasi penanganan anak tidak sekolah dalam konteks sosial, ekonomi, kultural masyarakat pesisir di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, dari Januari hingga Februari 2026.

Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti. Komposisi informan terdiri dari: 1 orang pejabat/staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara; 1 orang aparat Kelurahan Bulu (Lurah); 1 orang tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jenggala; 2 orang tokoh masyarakat/pemuka agama; 3 orang orang tua/wali anak tidak sekolah; dan 3 orang anak tidak sekolah. Total informan sebanyak 11 orang.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, data ATS Disdikpora Kabupaten Jepara, dokumen kebijakan YSM, serta profil Kelurahan Bulu.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk

memetakan akar permasalahan secara sistematis, penelitian ini menggunakan analisis *Fishbone Diagram* atau diagram tulang ikan. Diagram ini memetakan akar permasalahan melalui tiga perspektif utama: aspek pemerintah, aspek masyarakat, dan aspek sistem. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan *member checking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Gerakan *Yuk Sekolah Maneh* (YSM)

Implementasi Gerakan *Yuk Sekolah Maneh* (YSM) di Kelurahan Bulu merupakan respon atas temuan data yang mengungkap masih adanya 31 anak usia sekolah yang tidak mengakses pendidikan. Program ini berupaya mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal, dengan target utama menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdikpora Kabupaten Jepara, diperoleh gambaran mengenai capaian program:

"Dari hasil pendataan dan validasi, terdapat sekitar 478 anak yang berhasil dikonfirmasi kembali ke jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dari jumlah tersebut, sekitar 311 anak bersedia dan telah kembali sekolah." (Aries Nurwiyantoko, 17 Januari 2026)

Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya sistematis melalui pendataan, verifikasi, dan pendekatan personal mulai membuahkan hasil di tingkat kabupaten. Namun, di tingkat kelurahan, efektivitas program masih menghadapi tantangan serius. Hal ini terungkap dari pengakuan Ketua RT 02 yang baru dilantik:

"Sebenarnya belum ada, Mbak. Jadi cara bahasane kulo nek enten program ngen ten iki ni, cara warga sing gadha putra je opo pun raden sekolah nek urung sekolah kan malah saya. Jadi jaring mireng berasa." (Jubairi, 20 Januari 2026).

Pernyataan ini mengungkap kesenjangan informasi yang signifikan antara program pemerintah dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Meskipun program YSM telah dicanangkan sejak periode kepemimpinan sebelumnya, sosialisasinya belum menjangkau hingga ke tingkat RT terbaru. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahawarin dkk. (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas program bantuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh presisi penargetan dan pendampingan di lapangan.

Dalam merespons hambatan tersebut, PKBM Jenggala hadir sebagai ujung tombak alternatif pendidikan nonformal. Menurut penuturan Kepala PKBM Jenggala, lembaganya menyediakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C dengan jadwal fleksibel:

"PKBM Jenggala berdiri sejak tahun 2012 dan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan... Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara fleksibel dengan jadwal dua hari dalam seminggu... Kami memberikan kelonggaran jadwal belajar. Anak-anak yang bekerja tetap diberi kesempatan untuk mengikuti

pembelajaran di waktu lain, mengambil modul, atau mengerjakan tugas susulan." (Niti Sumito, 17 Januari 2026).

Fleksibilitas ini menjadi kunci bagi anak-anak yang sudah bekerja. Pendekatan yang dilakukan mencoba menjembatani tuntutan ekonomi dan kebutuhan pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) yang menekankan mobilisasi sumber daya lokal dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan (Setiawan dkk., 2023).

Hambatan Sosial, Ekonomi, dan Kultural

Analisis menggunakan *Fishbone Diagram* mengungkap bahwa kompleksitas penghambat program YSM bersumber dari tiga dimensi utama: aspek pemerintah, aspek masyarakat, dan aspek sistem. Masing-masing aspek memiliki akar permasalahan yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

Dari aspek pemerintah, hambatan utama meliputi minimnya bantuan yang tepat sasaran, kurangnya program sosialisasi yang efektif, dan pengawasan yang kurang optimal. Lurah Bulu secara jujur mengakui keterbatasan anggaran untuk pendampingan ATS:

"Secara khusus, kelurahan belum memiliki anggaran tersendiri untuk pendampingan anak tidak sekolah. Namun demikian, kami tetap berupaya memberikan pendampingan melalui tokoh masyarakat, Babinsa, tokoh agama, dan pihak-pihak lain yang peduli." (Ashadi, 18 Januari 2026)

Pengakuan ini menunjukkan bahwa di tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, tidak tersedia instrumen kebijakan dan sumber daya yang memadai untuk menangani masalah ATS secara terstruktur dan berkelanjutan. Temuan ini memperkuat studi Ilmiah (2023) tentang pentingnya koordinasi lintas sektor dan alokasi sumber daya yang memadai dalam penanganan anak putus sekolah.

Dari aspek masyarakat, hambatan sosial-ekonomi-kultural saling terkait erat. Kemiskinan struktural menjadi akar masalah utama, sebagaimana diungkapkan oleh seorang ibu dari anak ATS:

"Alasannya karena kondisi keluarga dan pemikiran bahwa anak-anak saat ini sulit mendapatkan pekerjaan. Anak saya sudah ikut bapaknya bekerja sebagai nelayan... Walaupun tidak sekolah, yang penting bagi saya anak bisa membaca dan menulis." (Malikatun, 18 Januari 2026).

Pernyataan ini mencerminkan nilai budaya pragmatis di komunitas pesisir, di mana kemampuan produktif dan keterampilan bekerja dihargai lebih tinggi daripada prestasi akademis. Pandangan "yang penting bisa membaca dan menulis" menunjukkan batasan ekspektasi pendidikan hanya pada keterampilan dasar fungsional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asmiati dkk. (2022) yang menemukan bahwa rendahnya minat melanjutkan studi pada anak-anak nelayan

dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi dan keterlibatan anak dalam pekerjaan.

Hambatan sosial juga tercermin dari lemahnya pengawasan orang tua dan pengaruh teman sebaya. Ketua RT 03 menjelaskan:

"Kalau ekonomi sebenarnya bukan alasan utama, karena sekarang sekolah sudah gratis. Orang tua kebanyakan sudah memaksa anaknya untuk sekolah. Namun, karena orang tua bekerja sejak pagi, anaknya berangkat dari rumah tapi tidak sampai ke sekolah. Lama-kelamaan orang tua tidak bisa terus mengawasi dan akhirnya dibiarkan." (Eko Hariyanto, 18 Januari 2026).

Fenomena ini menunjukkan bahwa gratis dalam konteks sekolah formal tidak cukup. Biaya tidak langsung seperti transportasi, uang saku, dan yang lebih penting adalah *opportunity cost* ketika anak memilih sekolah dibanding bekerja, masih menjadi beban berat bagi keluarga miskin.

Praktik perkawinan dini juga menjadi faktor penghambat yang signifikan, terutama bagi anak perempuan. Tokoh agama setempat mengonfirmasi:

"Ada. Selama saya memegang amanah ini, sudah ada sekitar empat sampai lima kasus pernikahan dini. Untuk menguranginya, perlu ada bimbingan: edukasi tentang pentingnya pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, sosialisasi dampak pernikahan dini, dan memberikan konseling dan dukungan untuk remaja." (Abdullah Zubair, 19 Januari 2026).

Praktik ini secara otomatis mengakhiri akses anak terhadap pendidikan dan menjadi tantangan tersendiri bagi program YSM yang cenderung berfokus pada anak usia sekolah reguler.

Dari aspek sistem, kebijakan pendidikan yang kaku dan sentralistik belum mengakomodasi konteks lokal pesisir. Kurikulum yang seragam nasional seringkali terasa asing dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak pesisir. Seorang anak ATS yang berhasil kembali bersekolah mengungkapkan:

"Saya ingin mempunyai pengalaman dalam pendidikan. Saya ingin belajar lagi, punya pengetahuan, dan bisa menceritakan serta menjelaskan sesuatu dengan lebih baik." (Mohamad Fahrul Ar Rozak, 19 Januari 2026).

Pernyataan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, yang sayangnya belum sepenuhnya terpenuhi oleh sistem pendidikan yang ada. Studi Rasimi & Zylfiu (2023) menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan relevan dengan kehidupan siswa untuk meningkatkan motivasi belajar.

Dampak Hambatan terhadap Implementasi Program

Dampak dari berbagai hambatan tersebut terhadap implementasi YSM sangat signifikan. **Secara sosial**, norma masyarakat yang lebih menghargai kerja nyata melemahkan kampanye YSM untuk kembali bersekolah. Seorang anak ATS

yang bekerja sebagai penjual minuman mengaku harus berhenti sekolah setelah SMP untuk membantu biaya hidup dan pendidikan lima adiknya:

"Saya bersedia, tetapi masih mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tanggungan keluarga, karena masih harus membantu biaya hidup dan sekolah adik-adik." (Amelia Novitasari, 17 Januari 2026).

Kisah ini merefleksikan dilema yang dialami banyak anak di pesisir: keinginan untuk belajar terbentur pada rasa tanggung jawab untuk berkontribusi pada ekonomi rumah tangga sejak dini. Bahkan ketika pemerintah menawarkan kesempatan untuk kembali bersekolah dengan biaya lebih ringan, pertimbangan ekonomi tetap menjadi penghalang utama karena kehilangan potensi pendapatan dari anak yang bekerja.

Secara ekonomi, tawaran akses pendidikan tanpa dukungan ekonomi komprehensif belum cukup mengkompensasi hilangnya pendapatan anak yang bekerja. Hal ini diperkuat oleh pernyataan orang tua yang mengaku bahwa anak lebih memilih bekerja, dan kondisi kesehatan yang kadang tidak mendukung untuk sekolah. Temuan ini mengkonfirmasi studi Iryna dkk. (2023) tentang hubungan siklus antara kemiskinan dan pendidikan, di mana pendidikan rendah menyebabkan kemiskinan, dan kemiskinan menghalangi akses ke pendidikan.

Secara kultural, kekurangsesuaian antara nilai sekolah yang formal dan berorientasi masa depan dengan nilai hidup masyarakat pesisir yang pragmatis menciptakan resistensi. Tokoh agama setempat menjelaskan:

"Masalahnya sekarang, khususnya di pesisir, sebagian orang tua kurang memperhatikan pendidikan anak. Yang terpikirkan adalah bagaimana mencari uang, terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Pola pikirnya terkadang, 'Ah, bekerja sebagai nelayan itu tidak perlu sekolah tinggi.' Itu permasalahan utamanya." (Abdullah Zubair, 19 Januari 2026).

Pandangan ini menciptakan dikotomi palsu antara bekerja dan sekolah sebagai dua pilihan yang berseberangan, bukan sebagai hal yang saling melengkapi. Akibatnya, program YSM kerap dipersepsikan sebagai gangguan terhadap sistem nilai yang telah mapan.

Strategi Kebijakan Perbaikan

Berdasarkan analisis terhadap aspek sistem, masyarakat, dan pemerintah yang menjadi sumber permasalahan ATS, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis.

Pertama, penguatan pendataan dan identifikasi ATS yang lebih akurat dan partisipatif. Diperlukan sistem pendataan terpadu dan *real-time* yang mengintegrasikan data dari Disdukcapil, Dinas Sosial, sekolah, dan kelurahan. Pendekatan ini akan memastikan tidak ada anak yang terlewat dari radar program penanganan, sekaligus memberikan data akurat untuk perencanaan intervensi. Sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis indikator risiko, seperti

sering absen, orang tua menganggur, atau tinggal di daerah terpencil, perlu dikembangkan untuk memungkinkan intervensi preventif.

Kedua, diferensiasi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ATS. Kebijakan harus secara eksplisit memetakan alur penanganan yang berbeda untuk setiap profil ATS. Bagi mereka yang terpaksa bekerja karena tekanan ekonomi, perlu ada skema pendidikan sambil bekerja (*school while work*) dengan jadwal super fleksibel. Bagi yang mengalami trauma atau rasa malu, perlu ada pendampingan psikologis sebelum reintegrasi ke pendidikan. Bagi yang ingin langsung bekerja, perlu ada jalur cepat pelatihan keterampilan vokasional yang *link and match* dengan industri.

Ketiga, penguatan peran Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan (PNF) melalui PKBM. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan pendanaan operasional PKBM, memastikan kualitas tutor melalui pelatihan berkelanjutan, dan memperkuat jejaring kerja dengan dunia industri untuk penyaluran lulusan. Kerja sama PKBM Jenggala dengan perusahaan garmen dapat menjadi model yang direplikasi untuk sektor lain di Jepara, seperti pariwisata bahari dan kerajinan ukir.

Keempat, mengatasi hambatan ekonomi secara komprehensif. Program bantuan harus diperluas mencakup bantuan transportasi, uang saku, atau program beasiswa kinerja yang dikaitkan dengan kehadiran dan prestasi belajar. Untuk keluarga miskin ekstrem, dapat dipertimbangkan program bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) khusus pendidikan yang memberikan insentif finansial kepada orang tua selama anak mereka tetap bersekolah.

Kelima, pendekatan kultural dan perubahan paradigma melalui strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang masif dan berkelanjutan. Kampanye sosial perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mantan ATS yang sukses sebagai agen perubahan. Materi KIE harus disampaikan melalui saluran yang dekat dengan masyarakat pesisir, seperti pengajian di mushola, pertemuan kelompok nelayan, dan media sosial lokal dengan konten yang relevan.

Keenam, pembentukan Gugus Tugas Terpadu Penanganan ATS tingkat kelurahan atau kecamatan. Gugus tugas ini beranggotakan perwakilan dari semua OPD terkait, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan perwakilan orang tua. Tugasnya merumuskan rencana aksi, memonitor pelaksanaan, dan melakukan evaluasi periodik dengan target yang jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip *Total Quality Management (TQM)* yang menekankan perbaikan berkelanjutan dan fokus pada kepuasan pelanggan (Busahdiar dkk., 2023).

Ketujuh, pengembangan kurikulum kontekstual berbasis potensi pesisir. Kurikulum harus dirancang tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan akademis, tetapi juga untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup (*life skills*) yang relevan dengan potensi lokal, seperti teknik penangkapan ikan modern, budidaya perikanan, pengolahan hasil laut, serta pengetahuan tentang konservasi

ekosistem pesisir. Dengan kurikulum yang kontekstual, anak-anak akan melihat hubungan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan nyata.

Kedelapan, pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai strategi jangka panjang. Program ini memerlukan konvergensi dengan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, dan dinas terkait lainnya. Keluarga ATS dapat diberi prioritas dalam program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan mikro, bantuan peralatan usaha, dan pendampingan pemasaran.

Analisis *Fishbone* yang diterapkan dalam penelitian ini mengungkap hubungan kausal tidak linear antara aspek sosial, ekonomi, dan kultural. Diagram yang dihasilkan (Gambar 1) memetakan secara sistematis akar permasalahan pada ketiga aspek utama serta merumuskan strategi penanganan yang komprehensif. Pemetaan ini memungkinkan intervensi dirancang untuk menyentuh akar permasalahan, bukan hanya gejala permukaan, sebagaimana ditegaskan dalam studi Satya (2016) tentang peningkatan mutu sekolah menggunakan analisis *Fishbone*.



Gambar 1. Fishbone Diagram

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program Gerakan *Yuk Sekolah Maneh* (YSM) di Kelurahan Bulu untuk menangani Anak Tidak Sekolah telah berjalan melalui tahapan pendataan, verifikasi, pendekatan persuasif, dan fasilitasi akses pendidikan. Namun efektivitasnya masih terkendala oleh hambatan kompleks yang bersumber dari tiga dimensi. Dari sisi pemerintah, pendekatan birokrasi, koordinasi antar OPD yang lemah, minimnya alokasi anggaran, serta kurangnya pendampingan lapangan menjadi faktor penghambat utama. Dari sisi masyarakat,

kemiskinan struktural, lemahnya pengawasan orang tua, dan pengaruh teman sebaya menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi keberlanjutan pendidikan anak. Dari sisi kultural, pandangan pragmatis masyarakat pesisir yang menganggap bekerja lebih penting daripada sekolah serta praktik perkawinan dini masih mengakar kuat dan sulit diubah.

Dampak dari hambatan tersebut sangat signifikan terhadap implementasi program. Tawaran akses pendidikan tanpa dukungan ekonomi komprehensif belum cukup mengkompensasi hilangnya pendapatan anak yang bekerja. Kampanye YSM untuk kembali bersekolah juga dilemahkan oleh norma sosial yang lebih menghargai kontribusi ekonomi langsung. Kekurangesesuaian antara nilai sekolah yang berorientasi masa depan dengan nilai hidup masyarakat pesisir yang pragmatis menciptakan resistensi terhadap program.

Penelitian ini merekomendasikan strategi kebijakan perbaikan yang meliputi: (1) penguatan pendataan terpadu dan sistem peringatan dini; (2) diferensiasi layanan pendidikan sesuai kebutuhan ATS; (3) penguatan peran PKBM dengan dukungan pendanaan dan jejaring industri; (4) perluasan program bantuan ekonomi komprehensif termasuk bantuan tunai bersyarat; (5) kampanye perubahan paradigma berbasis kultural melibatkan tokoh agama dan masyarakat; (6) pembentukan Gugus Tugas Terpadu Penanganan ATS; serta (7) pengembangan kurikulum kontekstual berbasis potensi pesisir.

Implikasi teoretis dari penelitian ini memperkuat teori ekologi Bronfenbrenner dengan menunjukkan bagaimana interaksi kompleks antara faktor keluarga, kebijakan pemerintah, dan budaya pesisir menciptakan ekosistem yang meminggirkan hak anak atas pendidikan. Analisis *Fishbone* yang diterapkan mengungkap hubungan kausal tidak linear, mengkritisi pendekatan kebijakan linier yang selama ini diterapkan. Penelitian ini juga memperkaya teori manajemen pendidikan berbasis masyarakat dengan menegaskan bahwa efektivitas manajemen pendidikan sangat tergantung pada legitimasi kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmiati, A., Sumardi, L., Ismail, M., & Alqadri, B. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Melanjutkan Studi Anak Pada Masyarakat Nelayan di Desa Seruni Mumbul Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *7*(2c), 786–793. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.645>
- Busahdiar, Karimah, U., & Tamin, S. (2023). Total Quality Management (TQM) and Basic Education: Its Application to Islamic Education in Muhammadiyah Elementary Schools. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *20*(2), 215–232. <https://doi.org/10.14421/jpai.v20i2.8015>
- Ilmiah, S. (2023). Koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah. *Jurnal Administrasi Publik*, *19*(1), 45–58.

- Instruksi Bupati Jepara Nomor 050/I Tahun 2023 tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Iryna, S., Oksana, B., & Natalia, K. (2023). Rural education development as a factor of poverty overcoming in China. *Agricultural and Resource Economics*, *9*(2), 45-62.
- Koentjaraningrat, R. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Rahawarin, B., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Efektivitas Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Dalam Mengurangi Siswa Putus Sekolah: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, *12*(4), 1053-1067. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5883>
- Rasimi, L., & Zylfiu, N. (2023). Integration of music education with social science in elementary school curriculum in Kosovo. *Journal of Educational Sciences*, *24*(2), 112-125.
- Satya, S. (2016). The Application of Fishbone Diagram Analisis to Improve School Quality. *Dinamika Ilmu*, *16*(1), 59-74.
- Senowarsito, Handayani, A., Purnamasari, I., & Bukhori, A. (2023). Studi Eksplorasi Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *13*(2), 162-171.
- Setiawan, B., dkk. (2023). Community-Based Education: Konsep dan Implementasi dalam Penanganan Anak Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, *10*(1), 23-38.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>